



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI	11
2.1. Kebijakan tentang Pemerintahan Desa	11
2.2. Kebijakan Publik	15
2.2.1. Analisis Kebijakan Publik	24
2.2.1.1. Perumusan Masalah	25
2.2.1.2. Pengembangan Alternatif Kebijakan	29
2.2.1.3. Alternatif Kebijakan	34
2.2.1.3.1. Status Quo	34
2.2.1.3.2. Modifikasi	35
2.2.1.3.3. Reformasi	36
2.2.2. Resistensi dan Faktor-faktor Pengaruhnya	38
2.2.2.1. Resistensi	38
2.2.2.2. Motivasi	41
2.2.2.3. Partisipasi	45
2.2.2.4. Kemampuan Keuangan Desa	51
2.2.2.5. Kepentingan	54
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Strategi Penelitian	58
3.2. Pemilihan Lokasi	58
3.3. Tipologi Desa	58
3.4. Jenis Data yang Dikumpulkan	62
3.4.1. Data Primer	62
3.4.2. Data Sekunder	62
3.5. Cara Pengumpulan Data	62
3.6. Teknik Analisis Data	63
3.7. Teknik Perumusan Masalah	63
3.8. Teknik Pemilihan Alternatif Kebijakan	64
3.9. Definisi Konseptual	67
3.9.1. Resistensi	67
3.9.2. Motivasi	68
3.9.3. Partisipasi	68
3.9.4. Kemampuan Keuangan Desa	68
3.9.5. Kepentingan	68
3.9.6. Status Quo	69



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Resistensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan

Keuangan

Lurah Desa dan Pamong Desa

SETIAWAN, Hendri, Dr. Samodra Wibawa

3.9.7. Modifikasi 69
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Dikawatirkan dan http://eta.repository.ugm.ac.id/

3.9.8. Reformasi	69
3.10. Sistematika Penulisan	70
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	74
4.1. Letak Geografis	74
4.2. Keadaan Pemerintahan	76
4.2.1. Keadaan Wilayah Administratif	76
4.2.1.1. Luas Wilayah	76
4.2.1.2. Tata Guna Tanah	77
4.2.1.3. Kondisi Penduduk	78
4.2.2. Pemerintahan Desa	80
4.2.2.1. Sejarah Pemerintahan Desa di Kabupaten Sleman	80
4.2.2.1.1. Zaman Sebelum Kemerdekaan	85
4.2.2.1.2. Zaman Setelah Kemerdekaan	91
4.2.2.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lurah Desa/Pamong Desa ..	111
4.2.2.2.1. Lurah Desa	111
4.2.2.2.2. Sekretariat Desa	113
4.2.2.2.3. Bagian-bagian	113
4.2.2.2.4. Padukuhan	117
4.2.2.2.5. Sekretariat BPD.....	117
4.2.2.3. Karakteristik Aparat Desa	118
4.2.2.3.1. Pendidikan Lurah Desa dan Pamong Desa	118
4.2.2.3.2. Jenis Kelamin Lurah Desa dan Pamong Desa	120
4.2.2.4. Karakteristik Badan Perwakilan Desa	121
4.2.2.5. Karakteristik Desa Sampel Penelitian	122
4.2.2.5.1. Desa Kepuharjo	122
4.2.2.5.2. Desa Margokaton	133
4.2.2.5.3. Desa Triharjo	144
4.2.2.5.4. Desa Banyuraden	155
4.3. Kesimpulan Bab IV	167
BAB V KEBIJAKAN TENTANG PENGHASILAN LURAH DAN	
PAMONG DESA	168
5.1. Perumusan Kebijakan Penghasilan Lurah dan Pamong Desa	168
5.1.1. Proses Pembuatan Raperda di Tingkat Eksekutif	171
5.1.2. Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	178
5.1.2.1. Pembicaraan Tahap I	179
5.1.2.2. Pembicaraan Tahap II	181
5.1.2.3. Pembicaraan Tahap III	187
5.1.2.4. Pembicaraan Tahap IV	188
5.1.2.5. Proses Pengesahan dan Perundangan Peraturan Daerah ..	191
5.2. Analisis Isi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003	193
5.2.1. Tujuan antara Motivasi Negatif dan Motivasi Negatif	193
5.2.2. Mekanisme Pengaturan Penghasilan antara Kepentingan dan	
Keadilan	196
5.2.3. Anggaran: Perlu Subsidi yang lebih jelas	203
5.3. Kesimpulan Bab V	205
BAB VI RESISTENSI TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 9	
TAHUN 2003	208
6.1. Resistensi Kebijakan oleh Lurah dan Pamong Desa	208
6.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resistensi Kebijakan	221



6.2.1. Motivasi Lurah Desa dan Pamong Desa	221
6.2.2. Partisipasi Lurah Desa dan Pamong Desa	224
6.2.3. Kemampuan Keuangan Desa	229
6.2.4. Kepentingan Lurah Desa dan Pamong Desa	233
6.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resistensi di Desa Sampel	235
6.3. Kesimpulan Bab VI	250
BAB VII ALTERNATIF KEBIJAKAN	253
7.1. Deskripsi Alternatif Kebijakan	253
7.1.1. Kebijakan Status Quo	254
7.1.1.1. Kebijakan Umum	254
7.1.1.2. Fokus Kebijakan	255
7.1.2. Kebijakan Modifikasi	258
7.1.2.1. Kebijakan Umum	258
7.1.2.2. Fokus Kebijakan	258
7.1.3. Kebijakan Reformasi	261
7.1.3.1. Kebijakan Umum	261
7.1.3.2. Fokus Kebijakan	262
7.2. Penilaian Alternatif Kebijakan	266
7.2.1. Dampak Positif dan Konsekuensi Alternatif kebijakan di Desa Kepuharjo	256
7.2.1.1. Alternatif Kebijakan Status Quo	266
7.2.1.2. Alternatif Kebijakan Modifikasi	267
7.2.1.3. Alternatif Kebijakan Reformasi	268
7.2.2. Dampak Positif dan Konsekuensi Alternatif kebijakan di Desa Margokaton	271
7.2.2.1. Alternatif Kebijakan Status Quo	271
7.2.2.2. Alternatif Kebijakan Modifikasi	272
7.2.2.3. Alternatif Kebijakan Reformasi	273
7.2.3. Dampak Positif dan Konsekuensi Alternatif Kebijakan di Desa Triharjo	276
7.2.3.1. Alternatif Kebijakan Status Quo	276
7.2.3.2. Alternatif Kebijakan Modifikasi	277
7.2.3.3. Alternatif Kebijakan Reformasi	278
7.2.4. Dampak Positif dan Konsekuensi Alternatif Kebijakan di Desa Banyuraden	280
7.2.4.1. Alternatif Kebijakan Status Quo	280
7.2.4.2. Alternatif Kebijakan Modifikasi	282
7.2.4.3. Alternatif Kebijakan Reformasi	283
7.2.5. Hasil Penilaian Kriteria	285
7.2.5.1. Desa Kepuharjo	286
7.2.5.2. Desa Margokaton	288
7.2.5.3. Desa Triharjo	289
7.2.5.4. Desa Banyuraden	391
7.3. Kritik terhadap Kebijakan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Petunjuk Pelaksanaannya	293
7.3.1. Pembebanan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa: Perlu Konsistensi	293
7.3.2. Penatausahaan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa: Perlu Tindak Lanjut yang Jelas dan Tegas	296



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Resistensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan
Keuangan

Lurah Desa dan Pamong Desa

SETIAWAN Hendri, Dr. Samudra Wibawa

7.3.3. Sistem Penggajian Kepala Desa dan Perangkat Desa: perlu Lebih

Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Konferensi	298
7.4. Kesimpulan Bab VII	300
BAB VIII PENUTUP	302
8.1. Kesimpulan	302
8.2. Saran	305
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	